

**KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
PARIWISATA PESISIR BARAT SEBAGAI
KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
DI PROVINSI LAMPUNG**
(*Policy Paper*)



BALIBANGDANOV
PROPINSI LAMPUNG
2016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran *Allah SWT* semoga kita semua dapat menjalankan kegiatan sehari-hari yang senantiasa dalam lindungan *Allah SWT*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM–Unila), pada kesempatan ini kembali memberikan kontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya dalam penyusunan makalah kebijakan yang berjudul “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru di Provinsi Lampung”.

Makalah ini memuat analisis kebijakan pengembangan kawasan ekonomi baru khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat yang meliputi Pendahuluan, Deskripsi Masalah, Pilihan Kebijakan, Simpulan dan Rekomendasi. Dengan demikian melalui Makalah Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru di Provinsi Lampung.

Semoga Makalah Kebijakan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Pemerintah Provinsi Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandarlampung, 2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas
Lampung (LPPM Unila)
Team Leader,

Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Abstrak | iv |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| Bab 2 Deskripsi Masalah | 4 |
| Bab 3 Pilihan Kebijakan | 8 |
| Bab 4 Simpulan dan Rekomendasi | 10 |
| Daftar Pustaka | 12 |

ABSTRAK

Makalah kebijakan ini disusun untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat. Kondisi eksisting permasalahan yang dihadapi diantaranya komitmen dari berbagai elemen, yaitu masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, BUMD serta BUMN yang memiliki peran penting pada setiap tahap pendirian KEK Pariwisata Pesisir Barat. Sebagaimana telah diuraikan pada masing-masing bab, maka pemilihan alternatif kebijakan lebih prioritas pada alternatif keempat, yaitu membangun komunikasi efektif pada lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar.

Pemilihan alternatif kebijakan yang lebih prioritas khususnya pada alternatif keempat merupakan simpulan dari penyusunan Makalah Kebijakan ini. Beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi atas kebijakan tersebut, antara lain penerbitan surat kepada seluruh SKPD dan BUMD terkait dalam rangka persiapan pendirian KEK Pariwisata Pesibar, penerbitan surat kepada Bupati Pesisir Barat dalam rangka persetujuan penetapan lokasi KEK Pariwisata Pesibar, penerbitan surat kepada swasta, BUMN dan masyarakat dalam rangka pendirian KEK Pariwisata Pesibar, dan fasilitasi seluruh tahapan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Nasional KEK hingga penerbitan dokumen Peraturan Pemerintah tentang KEK Pariwisata Pesibar.

Kata kunci : KEK, komitmen, komunikasi efektif, kebijakan.

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata Indonesia tentunya saling terkait satu sama lain dengan perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Potensi sumber daya alam dan manusia pariwisata yang dimiliki oleh Lampung tidak kalah bernilai tinggi dengan daerah lain di Indonesia bahkan internasional¹. Namun, bagaimana mewujudkan pariwisata Lampung menjadi salah satu *world icon tourism* bagi *tourism shareholders* dan *tourism stakeholders*?

Upaya yang perlu dilakukan oleh *tourism shareholders* dan *tourism stakeholders* antara lain dengan membangun iklim investasi pariwisata yang menarik melalui desain kebijakan dan produk hukum, baik pusat dan daerah yang meliputi :²

- ✓ Desain sistem insentif investasi pusat dan daerah;
- ✓ Kepastian penguasaan lahan;
- ✓ Integrasi pelayanan pusat dan daerah.

Perwujudan iklim investasi pariwisata yang menarik akan menciptakan paradigma baru pembangunan di Provinsi Lampung, yaitu :³

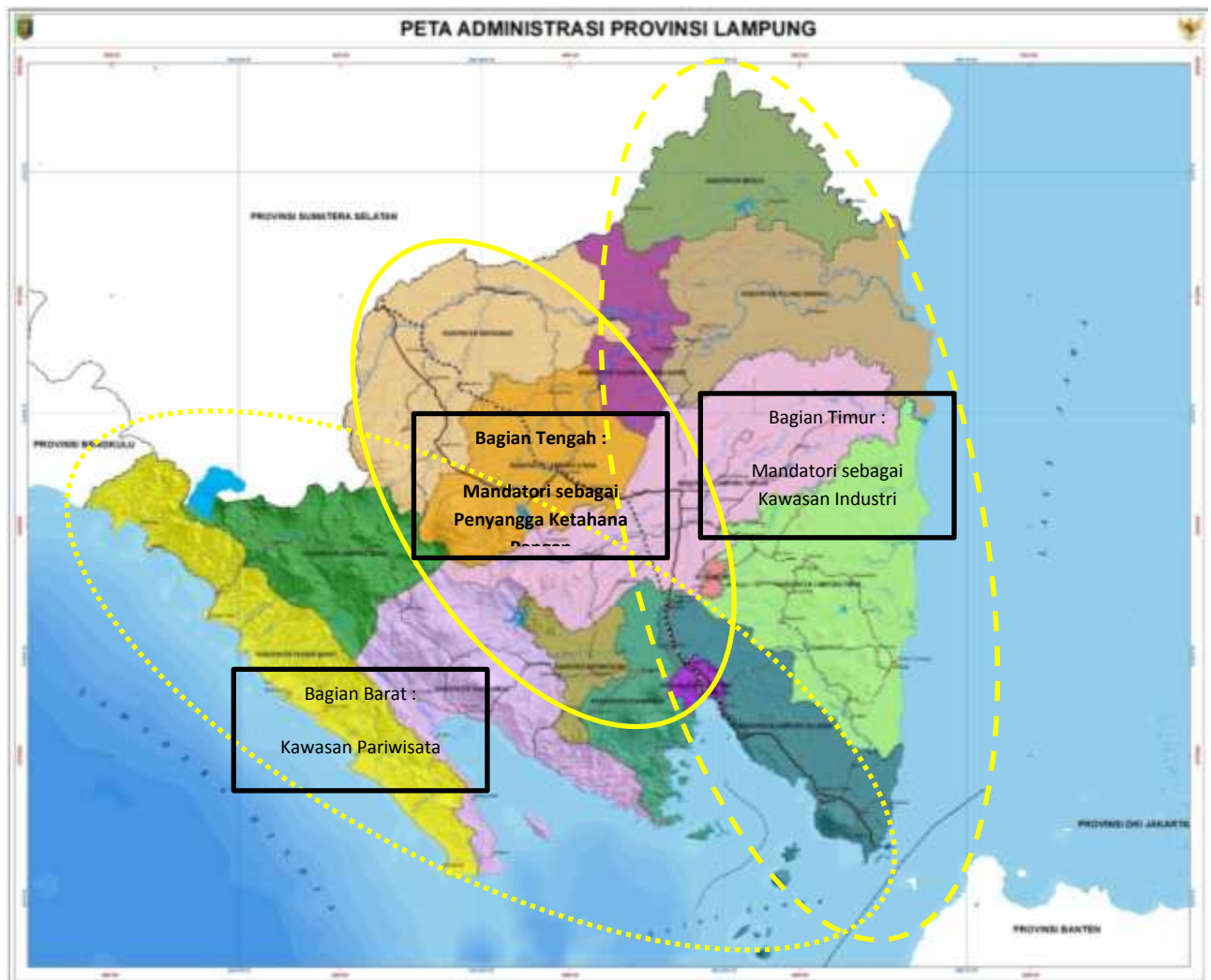
- ❖ Koridor perekonomian Lampung berbasis udara dan maritim;
- ❖ Sistem logistik mendukung strategi industri Lampung;
- ❖ Koridor ekonomi mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Lampung;
- ❖ Menciptakan *foreland* dan *hinterland* sistem logistik Lampung.

¹ *Lampung Rising Pearl*, Bappeda Provinsi Lampung, Bandarlampung, 2014, hal. 12

² Paparan : *Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Lampung sebagai Kawasan Pertumbuhan Baru*, Bakrieland – Property, Jakarta, 2016, hal. 20.

³ *Ibid*, hal. 21.

Gambar 2.1. Klaster Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung



Sumber : Rancangan RPIP Provinsi Lampung, 2016-2035

Makalah Kebijakan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1 di atas.⁴ Sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah dokumen **Studi**

⁴ *Rancangan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Lampung 2016-2035*, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 2016, hal. II-20.

Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pesisir Barat.⁵

Makalah kebijakan ini disajikan dalam beberapa bab diantaranya bab pendahuluan, bab deskripsi masalah, bab pilihan kebijakan, serta bab simpulan dan rekomendasi.⁶

⁵ *Rancangan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat*, Balibangdanov Provinsi Lampung, Lampung, Bandarlampung, 2016.

⁶ Eoin Young and Lisa Quinn, *A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*, Open Society Institute, Budapest – Hungary, 2002, hal. 22.

BAB 2

DESKRIPSI MASALAH

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung khususnya Pesisir Barat menghadapi banyak tantangan dari berbagai aspek.⁷ Persoalan tersebut memerlukan peran penting dari berbagai pihak sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1. Hubungan *Stakeholders & Shareholders Tourism*



Sumber : Hasil Analisis, 2016

Mewujudkan sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi baru memerlukan peran penting dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN/BUMD, maupun masyarakat. Hubungan kerja yang baik akan mendorong percepatan pembangunan KEK Pariwisata Pesisir Barat. Sebagaimana telah diuraikan pada

⁷ *Lampung West Coast Visionary*, Bappeda Provinsi Lampung, Bandarlampung, 2014, hal. 70.

Bab Pendahuluan, upaya yang perlu dilakukan oleh *tourism shareholders* dan *tourism stakeholders* antara lain dengan membangun iklim investasi pariwisata yang menarik, yaitu desain sistem insentif investasi pusat dan daerah, kepastian penguasaan lahan dan integrasi pelayanan pusat dan daerah.⁸

Berdasarkan Gambar 2.1, maka permasalahan yang tengah dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesisir Barat ini , antara lain :

1. KEK, kebutuhan dokumen pendirian KEK berupa dokumen belum seluruhnya tersedia :⁹
 - a. Dokumen deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK, ***belum tersedia***;
 - b. Dokumen peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan, ***belum tersedia***;
 - c. Dokumen rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi, ***belum tersedia***;
 - d. Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial, ***sudah tersedia***;
 - e. Dokumen AMDAL, ***belum tersedia***;
 - f. Dokumen usulan jangka waktu beroperasi KEK dan Renstra KEK, ***belum tersedia***;
 - g. Dokumen bukti hak atas tanah, ***belum tersedia***;
 - h. Dokumen persetujuan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ***belum tersedia***;
 - i. Dokumen rekomendasi otoritas pengelola infrastruktur, ***belum tersedia***;
 - j. Dokumen pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan KEK, ***belum tersedia***.

⁸ Paparan : *Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Lampung sebagai Kawasan Pertumbuhan Baru*, loc. cit.

⁹ Permenko Bidang Ekonomi Selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-07/M.EKON/10/2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kemenko Bidang Ekonomi, Jakarta, 2016, hal. 7.

2. Pemerintah Daerah (Provinsi&Kabupaten), kebutuhan dokumen pendirian KEK berupa kebijakan pemerintah daerah belum tersedia;¹⁰
 - a. Dokumen instruksi Gubernur Lampung kepada Bupati Pesisir Barat terkait usulan KEK Pesisir Barat, **belum tersedia**;
 - b. Dokumen hasil verifikasi usulan KEK yang berisi persetujuan (penolakan) pembentukan KEK oleh Bupati Pesisir Barat, **belum tersedia**;
 - c. Dokumen produk hukum daerah tentang insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi serta kemudahan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, **belum tersedia**;
 - d. Dokumen lengkap KEK diusulkan Gubernur Lampung kepada Ketua DN KEK melalui Sekretaris DN KEK, **belum tersedia**;
 - e. Dokumen usulan pembentukan Dewan Kawasan oleh Gubernur Lampung kepada Ketua DN KEK, **belum tersedia**.
3. Pemerintah Pusat, kebutuhan dokumen pendirian KEK berupa kebijakan pemerintah pusat belum seluruhnya tersedia;¹¹
 - a. Dokumen verifikasi dan evaluasi KEK oleh Sekretaris DN KEK, **belum tersedia**;
 - b. Dokumen kajian KEK oleh Tim Pelaksana, **belum tersedia**;
 - c. Dokumen rekomendasi persetujuan Tim Pelaksana atas usulan KEK, **belum tersedia**;
 - d. Dokumen persetujuan pembentukan KEK oleh Ketua DN KEK, **belum tersedia**;
 - e. Dokumen rekomendasi Ketua DN KEK atas usulan KEK Pariwisata Pesibar berupa Rancangan PP tentang KEK Pariwisata Pesibar, **belum tersedia**;
 - f. Dokumen PP tentang KEK Pariwisata Pesibar oleh Presiden RI, **belum tersedia**.

¹⁰ *Ibid.*

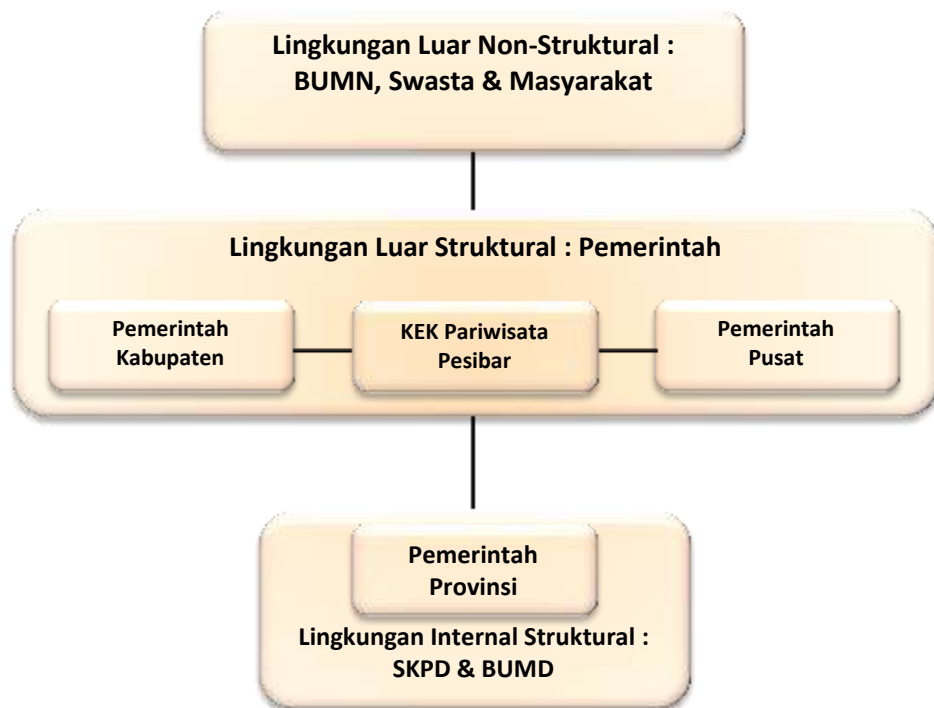
¹¹ *Ibid.*

4. Swasta, kebijakan investasi dari pihak swasta pada KEK Pesisir Barat ***belum tersedia***;
5. BUMN/BUMD, kebijakan investasi dari pihak BUMN/BUMD pada KEK Pesisir Barat ***belum tersedia***;
6. Masyarakat, dokumen kesediaan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan KEK Pesisir Barat ***belum tersedia***.

BAB 3

PILIHAN KEBIJAKAN

Gambar 3.1. Kerangka Kebijakan KEK Pariwisata Pesibar



Sumber : Diadopsi dari Kotler, 2016¹²

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, dapat diperoleh alternatif kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Alternatif pertama, membangun komunikasi efektif pada lingkungan internal struktural Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar;

¹² Philip Kotler, *Marketing Management International Edition*, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2000, hal. 135.

2. Alternatif kedua, membangun komunikasi efektif pada lingkungan luar struktural pemerintah dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar;
3. Alternatif ketiga, membangun komunikasi efektif pada lingkungan luar non struktural pada BUMN, swasta dan masyarakat dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar;
4. Alternatif keempat, membangun komunikasi efektif pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar.

Pada keempat alternatif kebijakan, masing-masing memiliki agenda kerja tersendiri. Tentunya perlu pengambilan keputusan yang tepat pada setiap alternatif kebijakan, sehingga penyelesaian masalah pendirian KEK Pariwisata Pesibar dapat dihasilkan solusi efektif. Mengingat penyelesaian masalah pendirian KEK Pariwisata Pesibar membutuhkan komunikasi efektif pada setiap alternatif, maka ***pemilihan alternatif kebijakan lebih prioritas pada alternatif keempat, yaitu membangun komunikasi efektif pada lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar.***

BAB 4

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kondisi eksisting pendirian KEK Pariwisata Pesibar dihadapkan pada permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian masalah secara tepat. Beberapa alternatif kebijakan telah diuraikan dengan masing-masing agenda kerja penyelesaian masalah. Pada pemilihan alternatif kebijakan diperoleh keputusan pada alternatif keempat, yaitu ***membangun komunikasi efektif pada lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pendirian KEK Pariwisata Pesibar.***

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan pemilihan kebijakan tersebut, direkomendasikan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Penerbitan surat kepada seluruh SKPD dan BUMD terkait dalam rangka persiapan pendirian KEK Pariwisata Pesibar :
 - a. Instruksi Gubernur kepada Sekretariat Daerah, SKPD dan BUMD mengenai pembentukan Panitia Kerja dalam rangka persiapan pendirian KEK Pariwisata Pesisir Barat;
2. Penerbitan surat kepada Bupati Pesisir Barat dalam rangka persetujuan penetapan lokasi KEK Pariwisata Pesibar :
 - a. Bupati Pesisir Barat menerbitkan persetujuan lokasi KEK yang diusulkan oleh Gubernur Lampung disertai dengan bukti hak atas tanah (Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha) setelah

- mendapatkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Pesisir Barat;
- b. Surat Pernyataan Gubernur Lampung tentang Kesanggupan Melaksanakan dan Mengelola KEK Pariwisata Pesibar;
 - c. Nota Kesepahaman Bupati Pesisir Barat dan DPRD Pesisir Barat atau Peraturan Daerah tentang :
 - i. Rencana pemberian insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - ii. Penyediaan anggaran;
 - iii. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Penerbitan surat kepada swasta, BUMN dan masyarakat dalam rangka pendirian KEK Pariwisata Pesibar :
- a. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung, yaitu listrik dari PLN Wilayah Lampung, gas dari PT. Pertamina Pemasaran Regional II Panjang, air bersih dari PDAM Limau Kunci, otoritas pengelola limbah di Pesisir Barat, otoritas pengelola pelabuhan di Pesisir Barat, otoritas pengelola bandara di Pesisir Barat dan telekomunikasi dari PT. Telkom Lampung Barat;
 - b. Sosialisasi kepada elemen masyarakat terkait persiapan pendirian KEK Pariwisata Pesibar;
 - c. Gubernur Lampung menyampaikan seluruh dokumen usulan KEK Pariwisata Pesibar kepada Ketua Dinas KEK melalui Sekretaris Dinas KEK.
4. Fasilitasi seluruh tahapan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Nasional KEK hingga penerbitan dokumen Peraturan Pemerintah tentang KEK Pariwisata Pesibar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eoin Young and Lisa Quinn, *A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*, Open Society Institute, Budapest – Hungary, 2002, hal. 22.

Lampung Rising Pearl, Bappeda Provinsi Lampung, Bandarlampung, 2014, hal. 12.

Lampung West Coast Visionary, Bappeda Provinsi Lampung, Bandarlampung, 2014, hal. 70.

Paparan : *Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Lampung sebagai Kawasan Pertumbuhan Baru*, Bakrieland – Property, Jakarta, 2016, hal. 20.

Philip Kotler, *Marketing Management International Edition*, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2000, hal. 135.

Rancangan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Lampung 2016-2035, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Bandarlampung, 2016, hal. II-20.

Rancangan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pesisir Barat, Balibangdanov Provinsi Lampung, Lampung, Bandarlampung, 2016.

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-07/M.EKON/10/2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus